

Judul : Dicandai Wakil Ketua Komisi VII, Mbak Mulan, Mau Nanya Apa Nyanyi?
Tanggal : Jumat, 02 Juli 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Dicandai Wakil Ketua Komisi VII Mbak Mulan, Mau Nanya Apa Nyanyi?

ANGGOTA Komisi VII DPR Raden Wulansari ikut hadir pada *fit and proper test* calon ketua dan anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) periode 2021-2025 secara virtual. Kesempatan itu digunakan wanita yang akrab disapa Mulan Jameela ini untuk menguliti komitmen para calon untuk menghadirkan energi ramah lingkungan.

Ada pun calon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan itu adalah Wahyudi Anas. Wahyudi saat ini merupakan salah satu pejabat di PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Persero.

"Ya Bu Mulan, gimana Mbak? Mau nyanyi atau bertanya Mbak," canda Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman sebelum mempersilakan istri Ahmad Dhani ini mengajukan pertanyaan kepada calon. "Mau berpantun," balas Mulan seraya terkekeh.

Mulan kemudian melanjutkan pertanyaannya kepada Wahyudi Anas. Dalam pemaparan visi misinya, Wahyudi secara lugas melontarkan dukungan untuk lebih mengenalkan masyarakat kepada Bahan Bakar Minyak (BBM) yang lebih ramah lingkungan. Hanya saja, setelah membaca *paper* dan mendengar penjelasan Wahyudi, masalah ini sama sekali tidak pernah disinggung.

"Sebagai contoh, Bapak tidak membahas mengenai isu adanya penghapusan premium, di mana premium ini merupakan bukan bahan bakar yang ramah lingkungan," cecar politisi perempuan Gerindra ini.

Selanjutnya, sesuai tugas dan fungsi pengawasan BPH Migas, Mulan juga menanyakan apa saja terobosan yang akan dilakukan Wahyudi jika kelak terpilih sebagai salah satu Komisioner BPH Migas. "Kira-kira (kebijakan) apa saja yang akan Bapak ambil menyangkut digitalisasi SPBU dalam rangka pengawasan dan

distribusi BBM bersubsidi?" tanya Mulan lagi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman menegaskan, proses *fit and proper test* BPH Migas Periode 2021-2025 ini sudah berjalan secara konstitusional. Ini merespons protes Forum Karyawan SKK Migas yang mempertanyakan legalitas dan kompetensi dari para calon Komisioner BPH Migas.

"Tentu DPR tidak akan mungkin menjalankan *fit and proper test* kalau kita anggap tidak legal. Artinya, proses legalisasi ini sudah berjalan dan sekarang masuk dalam proses politik di DPR untuk mengerucutkan dari 18 nama menjadi 9 nama," tegas Maman.

Maman meminta penjelasan dari calon BPH Migas ini terhadap sikapnya merespons situasi di SKK Migas ini andai-kata terpilih menjadi anggota.

"Bagaimana bapak mengatasi protes dari forum karyawan SKK Migas. Karena anggota terpilih BPH Migas tentunya harus menghasilkan BPH Migas yang lebih baik ke depan dan kondusif di dalam," harap Maman.

Sementara itu, Wahyudi memastikan sebagai komitmen dukungan untuk menghadirkan BBM ramah lingkungan. Itu akan dilakukan melalui dukungan dengan pemberian insentif pada program-program BBM yang lebih ramah lingkungan.

Misal penurunan iuran, mengupayakan insentif fiskal, dan lainnya. Kemudian memberikan insentif pada program BBM yang kurang ramah lingkungan seperti menaikkan iuran, menurunkan kuota, mengupayakan penurunan subsidi secara bertahap.

Terkait komitmen digitalisasi SPBU, Wahyu menegaskan akan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan *stakeholders* yang menjalankan bisnis BBM. Agar target program tersebut dapat tercapai sesuai target dan tidak terjadi tumpang tindih terhadap fungsi kontrol dan pengawasan penyaluran BBM. ■ KAL